

ISLAM DAN POLITIK

Muhammad Nawir¹, Muslihatun Saripa², Syahrir³

muhammadnawir@unismuh.ac.id¹, muslihatunsaripa99@guru.sd.belajar.id²,
syahrirujung253@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Islam dan politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, di mana fenomena Islam politik melibatkan gerakan sekelompok Muslim yang berlandaskan ideologi yang mereka anut. Nazih Ayumi menyebutkan bahwa Islam politik berfungsi sebagai istilah payung (umbrella term) yang mencakup pemikiran, aksi, dan gerakan yang menunjukkan interaksi antara agama dan politik, serta mencerminkan nuansa aktivisme baik secara individual maupun kolektif untuk mendorong perubahan. Islam politik bukanlah representasi dari kekerasan, melainkan suatu aktivitas yang menjalankan agenda politik dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan, dan ideologi Islam. Aktivitas ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan menggulingkan rezim yang berkuasa melalui berbagai cara, seperti aksi protes, demonstrasi, pembentukan partai politik, serta gerakan bawah tanah. Di dalam konteks ini, keyakinan dan rasa saling memiliki dalam Islam berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan sosial dan politik.

Kata Kunci: Islam Politik, Aktivisme, Ideologi, Perubahan Sosial, Hak Politik, Demonstrasi.

PENDAHULUAN

Islam dan politik merupakan hal yang tdk bisa di pisahkan dalam kehidupan masyarakat. Islam politi merupakan penomena yang melibatkan sekelompok muslim yang melakukan gerakan berdasarkan idiologi yang mereka yakini.Nazih ayumi menjelaskan islam politik bisa digunakan sepagai ubrella term untuk bs menyebut penomena pemikiran ,akse dan Gerakan yg memperlihatkan adanya persinggungang atara agama dan politik dan sekaligus menunjukkan nuansa aktivisma,secara individual ataupun kolektif yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan.

Islam politik bukanlah sebuah istilah yang menunjukkan bahwa islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan tetapi lebih murupaka suatu aktivitas yang melaksanakan agenda politik yang menggunakan symbol,doktrin,Bahasa,gagasan dan idiologi islam..Dalam hal ini memperjuangkan aspirasi memperjuangkan hak-hak politik sampai menjatuhkan rezim yang telah berkuasa ,seperti aksi-aksi menyampaikan pendapat,demonstrasi,membentuk partai politik serta Gerakan bawah tanah.Islam memiliki keyakinan dan rasa saling memiliki dan kedua hal tersebut saling berinteraksi didalam kehidupan sosial dan politik islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi

Islam sebagai agama samawa (yang datang dari tuhan),tdk melulu mengatur tentang kehidupan akhirat saja,Pasalnya islam juga mengatur bagaimana memimpin didunia,bagaimana menghormati pemimpin dan hal lain yang hubungannya lebih keduniawi yang kemudian dapat di mengerti melalui fiqhi muamalah.Serta hal-hal yang termasuk didalamnya juga telah di atur dalam islam yaitu berkenaan degan politik

Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan ummat biasa di istilahkan dengan (ri'ayah syu-AQ ummah).Islam dan politik tidak boleh di pisahkan ,karena islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yg tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat islam.Begitu pula politik

tanpa islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang akan mengagunkan kekuasaan, jabatan, bahan dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu politik dalam islam sangat penting bagi mengimngatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syaria'at islam boleh di wadah oleh politik.

Perbincangan mengenai Islam dan politik atau agama dan Negara memang merupakan tema yang cukup menarik dan tak pernah basi untuk dibicarakan, terutama setelah berkembangnya pemikiran politik sekular di dunia Islam termasuk di Indonesia. Perbincangan ini semakin mengemuka setelah penghapusan sistem kekhilafahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal al-Tattur pada tanggal 3 Maret 1924 dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara serta penghapusan syari'at sebagai sumber hukum tertinggi negara.

Pemisahan agama dan negara (sekularisme) yang dilakoni Mustafa Kemal di Istanbul merupakan sebuah perwujudan atas keinginan yang kuat untuk mengikuti dan mengadopsi pemikiran politik sekular dari barat dengan grand theory utamanya Max Weber. Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena secara histories ia terlahir dari perlawanan atas kejumudan pemikiran gereja pada abad pertengahan.

Di Indonesia, agama dan negara masih bersifat broblematis. Persoalan ini berpusat dan berakar pada bagaimana “menghadirkan” peran Islam dalam lingkup negara bangsa atau netion state. Ketika konstituante berupaya menyusun UUD yang baru, persoalan pilihan muncul: Pancasila atau Islam. Dan tarik menarik kepentingan politik yang demikian kuat dari golongan nasionalis sekular dan nasionalis Islam tersebut, Akhirnya terjadilah kompromi politik dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Begitupun ketika masa Orde Baru, Islam – terutama di masa-masa awal Orde Baru – dalam taraf tertentu, identik dengan ekstrim kanan, oposisi, anti-Pancasila, dan lain-lain sejenisnya. Kesan seperti ini muncul lagi, di masa Orde Kabinet Kerja, Jokowi Widodo sekarang ini.

Penjelasan di atas merupakan sebuah realitas empiris yang menjelaskan bahwa terdapat ketidak mampuan untuk mendialogkan visi sekuler dengan visi yang menginginkan warna agama dalam dasar negara sehingga negara dalam realitas politik terkadang melakukan penyimpangan dari etika dan moralitas agama. Sebab, dari agamalah para politisi mencoba memusatkan perhatian dalam pengertian mencari legitimasi mereka, baik secara langsung ataupun tidak. Agama dipergunakan sebagai sumber legitimasi bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat, yang merupakan basis dari masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Islam dan politik atau agama dan negara dalam pemikiran politik Islam, khususnya jika masalah ini dilihat dari konteks keindonesiaan, maka dirasa perlu dikaji pandangan dan sikap-sikap politik atau pemikiran politik umat Islam terkemuka di Indonesia. Pandangan mereka dianggap sebagai representasi pemikiran dan mengikat dalam berbagai masalah, tidak hanya menyangkut masalah keagamaan tetapi juga dalam masalah-masalah lain.

B. Islam dan Politik

Telah terjadi polarisasi pemikiran politik dalam memandang Islam dan politik atau agama dan negara. Secara umum, terdapat tiga polarisasi pemikiran yang berkembang disekitar wacana tersebut di Indonesia, yaitu (1) pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem ketatanegaraan atau sekularisme; (2) wacana yang melihat agama dan negara bersifat komplementer; dan (3) wacana yang bercorak integralistik.¹ Sebelum ketiga arus utama di atas dikemukakan, perlu diuraikan secara singkat mengenai latar belakang konseptual tentang agama. Karena konsepsi dan definisi membawa implikasi pada perbedaan wacana tentang agama dan negara. Konsepsi yang dimaksud adalah konsep

agama yang berisi (1) ajaran moralitas, (2) pranata sosial politik dan hukum, bahkan mungkin (3) doktrin atau ajaran tentang metode hidup bidang ekonomi, dan juga doktrin tentang kehidupan politik.

Adapun ke tiga macam wacana mengenai agama dan negara yang dikemukakan di atas, yakni: pertama, pola pemisahan. Dilihat dari segi legitamsi kekuasaan, bahwa kekuasaan yang diabsahkan secara agama dinilai tidak sesuai lagi dengan etika politik suatu negara moderen. Karena, kelemahan utama ligitimasi jenis ini terletak pada inti paham tentang kekuasaan agama, yaitu bahwa "hakikat kekuasaan tersebut berasal dari alam gaib atau Ilahi.²

Paham ini tidak menuntut legitamsi etis, dan legitamsi moral yang datang dari agama.³ Muhammad Hari Zamharir yang mengutip pendapat Suseno mengatakan bahwa dalam zaman sekarang ini, kebudayaan modern menolak keyakinan agama sebagai sumber kekuatan kehidupan nyata. Lebih lanjut Ia mengatakan, "Kekusaan politik dilihat sebagai realitas yang menusiawi, tanpa kekeramatan apa pun".

C. Sejarah Perkembangan islam dan politik di Indonesia

Islam merupakan agama terbesar di Indonesia,dengan sekitar 87,2 % penduduk Indonesia yg mengidentifikasi diri sebagai muslim.Indonesia merupakan Negara berpenduduk Mayoritas islam ke dua di dunia setelah fakistan.Sejarah dan perkembangan,Islam telah memainkan peran yang segnifikan dalam politik Indonesia,sejak masuknya agama ini kenusantara.Sejak era kerajaan islam sehingga era modern,hubungan antara islam dan politik di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika.Artikel ini akan membahas sejarah dan perkembangan hubungan antara islam dan politik di Indonesi, serta dampaknya terhadap kehidupan politik dan sosial di negara lain.

KESIMPULAN

Reformasi agama islam dalam politik mengerah pada perwujudan hubungan agama dan politik yang senantiasa mengalami kompromistis-kompromistis yang memungkinkan agama menjadi dasar religiulitas tidak hanya dalam kehidupan kesosial kemasyarakatan. Tetapi juga dalam kehidupan negara. Mewskipun demikian dalam islam terdapat asas bahwa ada yang tidak boleh di rubah dalam tempat maupun waktu dan ada hal-hal yg bisa berubah dalam tempat maupun waktu.

Islam sebagai Agama samawa yang dating dari tuhan tidak melulu mengatur tentang kehidupan Akhirat saja. Pсалnya, islam juga mengatur mengenai bagaimana pemimpin di dunia, bagaiman menghormati pemimpin dan hal lain yang hubungannya lebih keduniawi dan kemudian dapat di mengerti melalui fiqhi muamalah. Serta hal lain yang termasuk didalamnya juga telah di atur dalam islam yaitu berkenaan dengan tentang politik

Politik secara istilah sebagai mana yg di kemukakan oleh imam abul wafa ibnu'Aqil Al-Hambali, beliyau berkata bahwa politik (siyasah) merupakan semua Tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman,Ahmad shidiq \$ Rahman Kabi.1993.Ba'at satu prinsip Gerakan islam tela'ah Amaududi,Abyl.A'la.1984. khilafa dan kerajaan.evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam.Mizan Bandung
- Bagian penelitian dan pengembangan Agama
- Bai'at dalam khilafah dan jamaah El-Fawas press.Jakarta:Al-Qardhawy
- Pustaka..
- Saifuddin acmad,F.2000.Agama dalam politik keseragaman.Jakarta:Departemen Agama RI:
- Samsuddin M. Din. 2001.Islam dan politik era Orde Baru.Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu.Tjanrasasmita,Uka(Ed.).1984.Sejarah Nasional Indonesia III.Jakarta: PN Balai

Sultana,Ija \$ Betty Tresnawaty.2020 Political Knowlegde and political Behavior Among Highly
No.4,hal 150
Yusuf.!998.Pedoman Bernegara dalam perspektif Islam Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.